

Perubahan Strategi Politik Mendorong Faksionalisasi DPD PAN Surabaya dalam Muswil IV DPW PAN Jatim

Yasdad Al Farisi
Email : yasdadaf@gmail.com.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas faksionalisasi yang dialami internal DPD PAN Surabaya dalam pemilihan Ketua DPW PAN Jatim periode 2015-2020. Dinamika karakter faksionalisasi DPD PAN Surabaya dilihat dari proses menjelang Muswil DPW PAN Jatim hingga pasca Muswil. Adanya persaingan dua kubu calon ketua dalam memperebutkan kepemimpinan partai di Jatim sempat memunculkan dinamika di internal yang berdampak pada keriuhan pada saat Muswil berlangsung. Jenis penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif dengan pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, observasi dan indepth-interview. Penelitian ini digunakan Teori Faksionalisasi yang dikembangkan oleh Belloni dan Françoise Boucek. Teori faksionalisasi ini dapat menjelaskan fragmentasi di dalam partai, namun teori ini perlu memperhatikan karakteristik faksi didalamnya. Hasil temuan lapangan memperlihatkan terjadinya faksionalisasi di DPD PAN Surabaya pada saat Muswil DPW PAN Jatim disebabkan oleh lemahnya ideologi partai. *Kedua*, faktor perubahan mekanisme pergantian kepemimpinan partai. *Ketiga*, faktor karakter patronase di dalam partai. *Keempat*, adanya perbedaan kepentingan dari elit DPP PAN dan elit partai di daerah. *Kelima*, adanya gaya sentralistik dalam pengambilan keputusan di dalam partai. Sedangkan wujud dari faksionalisasi yang terjadi di DPD PAN Surabaya lebih bersifat kompetitif namun dalam perkembangannya sudah mengarah pada faksionalisasi degeneratif.

Kata Kunci: *Pemilihan Ketua Partai, Faksionalisasi, Internal Partai*

ABSTRACT

This study aims to discuss the internal factionalization of DPD PAN Surabaya in the selection of the Chairman of DPW PAN Jatim period 2015-2020. The dynamics of factionalization character of DPD PAN Surabaya is seen from the process ahead of Muswil DPW PAN Jatim to post Muswil. The existence of competition between the two candidates for leadership in the party leadership in DPW PAN Jatim had raised the dynamics in the internal impact on the chaos during Muswil lasts. This type of research is qualitative-descriptive with data collection using documentation, observation and indepth-interview techniques. This study used the Factionalization Theory developed by Belloni and Françoise Boucek. This Factionalization Theory can explain the fragmentation within the party, but this theory needs to consider the characteristics of the factions inside. Field findings show the factionalization in DPD PAN Surabaya during Muswil DPW PAN Jatim caused by weak party ideology. Second, the change factor of party leadership change mechanism. Third, the characteristic factor of patronage within the party. Fourth, there are differences of interests of the elite DPP PAN and party elites in the region. Fifth, the centralistic style of decision-making within the party. While the form of factionalization that occurred in the DPD PAN Surabaya more competitive, but in its development has led to degenerative factionalization.

Keywords: *Party leader selection, Factionalization, Intra Party*

PENDAHULUAN

Faksionalisasi partai merupakan gejala yang wajar dan sulit untuk dihindari keberadaannya. Dapat dikatakan bahwa hampir semua partai di Indonesia telah menjadi korban faksionalisme serius yang kadang berujung pada perpecahan. Terkadang partai politik juga tidak bisa mengelola rutinisasi perilakunya karena tercipta *dysfunctional factionalism* (disfungsional faksionalisme) di internal yang membuat partai politik sulit untuk menjadi aktor politik yang tunggal akibat pertarungan faksi-faksi (Efriza, 2012). Pada kasus tertentu, didapati bahwa faksionalisasi didalam partai kerap berujung eksodus secara masif dari partai, lalu mendirikan partai-partai baru yang selanjutnya dapat menjadi ancaman bagi keberlangsungannya sistem kepartaian dan dan stabilitas politik. (Rasid Pora, 2014). Sangatlah wajar jika dinamika internal partai selalu tinggi, apalagi jika terkait dengan perebutan kekuasaan kepemimpinan partai. Pergantian pemimpin partai menjadikan kader-kader dari internal partai saling bersaing memperebutkannya. Hal ini dapat memicu munculnya faksi-faksi di dalam internal partai dalam menyikapi pergantian kepemimpinan partai.

Salah satu Partai yang mengalami faksionalisasi pada saat perebutan jabatan ketua partai adalah DPD PAN Surabaya. Dapat dikatakan bahwa PAN memiliki tradisi rotasi kepemimpinan politik yang cukup baik. Sejak dilahirkan, partai ini melembagakan regenerasi dan pergantian kepemimpinan tiap satu periode. Namun permasalahan muncul ketika terjadi perubahan strategi politik PAN terkait mekanisme pemilihan ketua partai ditingkat DPW, DPD dan DPC. Dari *one man one vote* beralih menggunakan mekanisme musyawarah untuk membentuk formatur.

Kebijakan ini oleh kader di daerah dilihat sebagai upaya hegemoni oleh pusat untuk menentukan siapa yang layak menjadi ketua partai di daerah. Muncullah perlawanan dari kader di daerah sehingga munculkan kubu dari masing-masing calon. Antara kedua kubu ini sama-sama membangun kekuatan di DPD PAN Surabaya, sehingga terjadi perbedaan pandangan antara DPD dengan beberapa DPC. Kuswiyanto yang mendapat dukungan dari DPD PAN Surabaya dan juga beberapa DPC, sedangkan Masfuk mengandalkan kedekatannya dengan elit DPP PAN dan mencoba mencari dukungan pada kader di tingkat akar rumput (Al Farisi, 2017).

Muswil DPW PAN Jatim dengan agenda pemilihan ketua dewan pengurus wilayah berlangsung ricuh. Pendukung salah satu calon bahkan merusak papan penghitungan suara karena merasa dicurangi. Buntutnya, muswil berakhir *deadlock*, sehingga gagal memilih Ketua DPW PAN Jatim. Kepengurusan DPW PAN Jatim mengalami kekosongan dan diisi oleh pelaksana tugas (Plt) Asman Abnur. DPP PAN menyatakan membatalkan hasil Muswil, pasca kisruh saling lempar kursi antara kubu Masfuk dan kubu Kuswiyanto. Tak lama, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN akhirnya resmi mengeluarkan surat keputusan (SK) untuk Kepengurusan DPW PAN Jawa Timur periode 2015-2020 yang diketuai oleh Masfuk, mantan Bupati Lamongan.

Dengan adanya fenomena yang terjadi di internal DPD PAN Surabaya diatas, peneliti tertarik untuk menjelaskan dan menganalisa faksi-faksi yang terbentuk di DPD PAN Surabaya pada saat Muswil berlangsung dan menjelaskan ciri-ciri dan kategori dari faksi yang terbentuk saat Muswil berlangsung serta dampak dari adanya faksionalisme terhadap internal PAN. Adanya perbedaan sikap diantara DPD PAN Surabaya dan beberapa DPC dibawahnya memperlihatkan adanya kelompok-kelompok di DPD PAN Surabaya dengan kepentingan yang berbeda.

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif riset yang mengeksplorasi fenomena faksionalisasi DPD PAN Surabaya Partai Golkar sehingga peneliti dapat menjelaskan mengapa faksi bisa terjadi dan bagaimana karakteristik faksi yang terjadi di DPD PAN Surabaya. Data diperoleh dari penelusuran dokumen, observasi, dan wawancara mendalam (*indept interview*). Wawancara mendalam dilakukan dengan informan yang dianggap penting dalam penelitian tentang fenomena faksionalisasi DPD PAN Surabaya. Untuk menganalisa data diinterpretasi dalam bentuk deskriptif atau uraian untuk penarikan kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian ini.

Ada beberapa kajian terdahulu yang membahas mengenai faksionalisasi dan dinamika internal partai. *Pertama*, penelitian yang membahas tentang pengaruh dinamika internal partai

terhadap strategi politik PAN pasca kongres IV tahun 2015. (Ratnia Solihah, 2015). Hasil dari penelitian ini memperlihatkan adanya pergantian kepemimpinan partai yang baru dalam PAN juga memunculkan strategi politik PAN yang tidak hanya berpengaruh bagi internal PAN tetapi juga berpengaruh bagi eksternal PAN.

Kedua, peneliti mengenai faksionalisme internal Partai Golkar di Maluku Utara pada pilkada pemilihan gubernur 2007-2008. (Misrina, 2015). Hasil penelitian ini menjelaskan faksionalisasi yang terjadi pada Partai Golkar disebabkan oleh faktor pragmatisme elit Partai dan hubungan patron-klien. Beberapa karakteristik faksi yang terjadi di internal Partai Golkar yaitu, (1) *Cligues and Tendencies*, yaitu faksi yang dibentuk oleh kubu pendukung Abdul Gafur. (2) *Personal, client-group faction*, faksi yang dibuat oleh pendukung Hamid Usman.

Ketiga, penelitian mengenai faksionalisasi DPC Partai Hanura Surabaya pada Pilkada Kota Surabaya 2015. (Suryani, 2016). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa faksionalisasi di DPC Partai Hanura Surabaya terjadi karena adanya permasalahan pribadi antara Ketua DPC dengan 14 PAC pada saat Pemilu Legislatif 2014. Pilkada Kota Surabaya 2015 semakin menguatkan faksionalisasi di DPC Partai Hanura Surabaya.

Beberapa studi mengenai permasalahan faksionalisasi dan dinamika internal partai lebih fokus pada kategorisasi faksi berdasarkan struktur faksi, tanpa melihat bagaimana aktivitas dari faksi yang ada. Hal ini lebih memudahkan secara metodologi karena terkadang faksi dengan struktur yang sama dapat melakukan tindakan yang berlainan. Hal ini menjadikan penulis mencoba untuk melengkapi penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini mengenai faksionalisasi di DPD PAN Surabaya guna memperkaya kajian penelitian tentang faksionalisasi partai. Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian – penelitian terdahulu karena, fokus penelitian ini adalah mengenai dinamika karakter faksionalisasi DPD PAN Surabaya dalam Muswil DPW PAN Jatim, serta membahas mengenai penyebab munculnya faksionalisasi di DPD PAN Surabaya. Sedangkan penelitian pertama membahas permasalahan yang disebabkan oleh dinamika internal partai tanpa mampu menjelaskan bahwa permasalahan ini muncul dikarenakan dinamika yang terjadi diantara faksi yang ada. Penelitian kedua membahas tentang penyebab munculnya faksionalisasi di internal partai, namun kurang memberikan ruang analisis pada karakteristik faksionalisasi yang terjadi. Sedangkan pada penelitian ketiga belum mampu menjelaskan secara rinci bagaimana munculnya faksi dukungan di internal partai yang menyebabkan konflik internal partai.

Hasil temuan lapangan memperlihatkan terjadinya faksionalisasi di DPD PAN Surabaya pada saat Muswil DPW PAN Jatim disebabkan oleh lemahnya ideologi partai. *Kedua*, faktor perubahan mekanisme pergantian kepemimpinan partai. *Ketiga*, faktor karakter patronase di dalam partai. *Keempat*, adanya perbedaan kepentingan dari elit DPP PAN dan elit partai di daerah. *Kelima*, adanya gaya sentralistik dalam pengambilan keputusan di dalam partai. Sedangkan wujud dari faksionalisasi yang terjadi di DPD PAN Surabaya lebih bersifat kompetitif namun dalam perkembangannya sudah mengarah pada faksionalisasi degeneratif.

Munculnya Faksionalisasi di DPD PAN Surabaya

Adanya perpecahan di DPD PAN Surabaya pada saat muswil berlangsung sebenarnya muncul karena berbagai faktor. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan salah satu Teori Faksionalisasi, yaitu teori mengenai penyebab munculnya faksionalisasi.

Terjadinya faksionalisasi tidak hanya disebabkan oleh kontrol pimpinan yang lemah, tapi juga disebabkan oleh tiga faktor yaitu ideologi, kepemimpinan partai dan karakter patronase (Belloni, 1978). Hasil temuan data dilapangan memperlihatkan bahwa faksionalisasi di DPD PAN Surabaya tidak hanya disebabkan oleh tiga faktor diatas, tetapi juga dipengaruhi oleh dua faktor lain.

Pertama, perubahan strategi politik yang dilakukan PAN pasca Kongres IV tahun 2015 mengenai aturan dalam permusyawaratan untuk memilih Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) maupun Dewan Pimpinan Daerah (DPD) berdampak pada faksionalisasi PAN.

Pada masa kepemimpinan sebelumnya (Kepemimpinan Hatta Rajasa), baik proses pemilihan Ketua DPW maupun Ketua DPD dilakukan dengan cara one man one vote dalam bentuk musyawarah, namun saat ini mengalami perubahan yaitu proses pemilihan dilakukan dengan cara formatur. Meskipun dalam melakukan penentuan Ketua dengan cara formatur ini bisa terjadi atau menemui deadlock, maka akan dilakukan voting juga. Perubahan ini

berdampak dalam pelaksanaan musyawarah wilayah (Muswil) Partai Amanat Nasional (PAN) Jatim, dimana perubahan ini dianggap oleh sebagian kader sebagai cara yang dilakukan DPP untuk memuluskan Masfuk menjadi ketua DPW PAN Jatim menggantikan Suyoto. Dengan dihapusnya mekanisme one man one vote dinilai mengurangi kewenangan peserta Muswil dalam menentukan siapa yang menduduki ketua DPW PAN Jatim. Ada ketakutan bahwa dengan mekanisme ini DPP akan mempunyai kewenangan lebih, karena anggota formatur yang menentukan adalah pusat. Hal ini sudah dapat dilihat jalannya musyawarah yang dilakukan anggota formatur ini akan sesuai dengan keinginan pusat.

DPP PAN memiliki alasan yang cukup kuat untuk melakukan perubahan pada mekanisme pemilihan bila dilihat dari sejarah partai, dimana ketika demokratisasi mulai dilakukan di internal partai berdampak pada dinamika internal yang sangat kuat dan PAN dinilai belum siap menghadapi dinamika internal yang terlalu kuat. Dikhawatirkan dengan adanya dinamika ini malah dapat melemahkan partai dan mengancam keberlangsungan partai.

Adanya perbedaan kepentingan politik elit partai dalam menentukan ketua DPW PAN Jatim, sehingga berdampak pada pembentukan faksi yang begitu tajam di internal DPD PAN Surabaya. Ada yang memilih untuk mendukung kubu Masfuk dan lainnya memilih untuk mendukung Kuswiyanto.

Tujuan adanya Muswil adalah regenerasi kepemimpinan partai, bahwa DPP mengusung Masfuk sebagai calon ketua DPW PAN Jatim dan ada perlawanan dari kader di daerah untuk mengusung Kuswiyanto sebagai pesaing dapat dilihat sebagai kontestasi kepentingan elit baik pusat maupun daerah untuk menduduki posisi sebagai ketua DPW PAN Jatim. Elit di DPP PAN tentu saja menginginkan orang akan menduduki posisi ketua DPW adalah orang yang sepemahaman dan mampu menjalankan kebijakan pusat dengan baik.

Sementara elit di daerah juga tidak menginginkan hegemoni oleh pimpinan pusat. Dalam hal ini Kuswiyanto yang dalam periode sebelumnya menjabat sebagai sekretaris DPW PAN Jatim tentunya menginginkan kelompoknya tetap menjadi arus dominan di PAN Jatim. Dengan adanya pencalonan Masfuk yang didukung oleh pusat tentu saja membuat kubu Kuswiyanto melakukan perlawanan di dalam arena Muswil. Kepentingan dari kubu Kuswiyanto tentu saja untuk tetap menjadi arus dominan di DPW PAN Jatim dan mempertahankan kekuasaannya di PAN Jatim.

Kedua, adanya gaya sentralistik dalam mekanisme pengambilan keputusan oleh pusat untuk menyelesaikan polemik di Muswil DPW PAN dapat dinilai sebagai kemunduran penerapan demokratisasi di internal partai. Suasana pengelompokan yang ada di internal DPW PAN Jatim juga mempengaruhi hasil keputusan Muswil. Faksi di DPW PAN Jatim terlibat secara langsung dalam perebutan otoritas dan kekuasaan internal partai melalui jabatan ketua DPW.

Peta Faksionalisasi DPD PAN Surabaya

Terdapat dua kubu di internal DPD PAN Surabaya, *Pertama*, Kubu DPD dipelopori oleh Surat selaku Ketua DPD PAN Surabaya. Selain dari pengurus di DPD di dalam kubu ini juga didukung oleh beberapa DPC yang memiliki persamaan pandangan dengan DPD. Pada awalnya kubu ini terbentuk dari faksi yang dipimpin oleh Surat dan beberapa DPC yang selama ini diakomodir oleh Surat. Karena Kuswiyanto sebelumnya menjabat sebagai sekretaris DPW PAN Jatim maka otomatis mendapat banyak dukungan dari orang-orang didalam kepengurusan baik di DPW maupun DPD dan DPC. Sama halnya yang terjadi di DPD PAN Surabaya, dimana kelompok Kuswiyanto sangat dominan di kepengurusan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Basuki Babussalam:

“kalau secara organisatoris karena mas kus ini adalah mantan sekretaris lama DPW PAN Jatim, maka orang yang menentukan siapa jadi pengurus PAN se jatim kan beliau. Secara fungsionaris tingkat DPD mas kus agak dominan.”

Dapat dikatakan ke 11 DPC ini mengikuti instruksi dari DPD untuk mendukung Kuswiyanto walaupun dukungan tersebut juga dipengaruhi adanya deal-deal politik diantara DPD dengan ketua DPC. Salah satunya dijanjikan posisi yang lebih tinggi di struktural maupun

dipertahankan posisinya. Mengingat bahwa ketua DPC sebelumnya yang menjadikan adalah Kuswiyanto, sehingga ada kecenderungan untuk kembali mendukung Kuswiyanto.

Kedua, kubu 20 DPC yang dipelopori oleh Endras Heru selaku salah satu ketua DPC. Ke 20 DPC ini memiliki persamaan pandangan bahwa selama ini Kuswiyanto hanya mementingkan kelompoknya saja. Oleh karena itu mereka mengharapkan adanya Ketua baru yang lebih mengakomodasi kepentingan mereka. Mereka juga merasa tidak puas dengan kinerja partai ketika dipimpin oleh Suyoto dan Kuswiyanto. Hal ini dapat dilihat dari perolehan kursi PAN Jatim selama pemilu berlangsung. Dimana suara PAN sempat mengalami penurunan karena adanya konflik internal partai pada saat penentuan daftar tetap Caleg.

Selain itu, kubu 20 DPC ini menilai bahwa Masfuk memiliki pengalaman sebagai mantan Bupati Lamongan dua periode. Ditambah lagi jaringan Masfuk tidak hanya di internal PAN saja tapi juga diluar PAN. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk menambah perolehan suara PAN dengan merekrut orang dari jaringan Masfuk diluar PAN. Selain itu Masfuk juga dinilai mempunyai dana yang besar untuk membesarkan partai, sehingga program partai dapat terlaksana dengan baik tanpa harus mengandalkan sumbangan anggota dari kader PAN yang menjadi anggota dewan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Endras Heru:

“Kita melihat pak masfuk ini mempunyai kemampuan sebagai mantan Bupati Lamongan. Sebenarnya pak Kus juga bagus, dalam arti untuk turun ke daerah-daerah. Tapi kita saat ini membutuhkan sosok yang tidak hanya dikenal didalam intern PAN saja tapi juga figur yang bisa merangkul diluar PAN. Tujuannya agar memperoleh dukungan yang lebih banyak, mungkin dengan adanya perubahan ini nanti orang-orang dari jaringan pak masfuk yang sebelumnya belum ikut PAN dapat ditarik kedalam partai. Jadi ini latar belakang kita. Disamping itu pak masfuk itu orangnya loyal dan punya integritas dan juga kreatifitas. Loyalnya bagi PAN dari awal pembentukannya. Termasuk juga rela berkorban untuk pembiayaan bagi kepentingan partai.”

Kubu 20 DPC ini dapat dikatakan sebagai kubu diluar arus dominan di internal DPD PAN Surabaya, sehingga menginginkan adanya kepemimpinan partai yang baru yang lebih akomodatif pada kepentingan mereka. Mereka berani untuk mengambil sikap yang berbeda dengan DPD terkait arah dukungan pada calon Ketua DPW PAN Jatim.

Peneliti mencoba menyajikan daftar DPC dari masing-masing kubu. Berikut tabel daftar kubu di DPD PAN Surabaya:

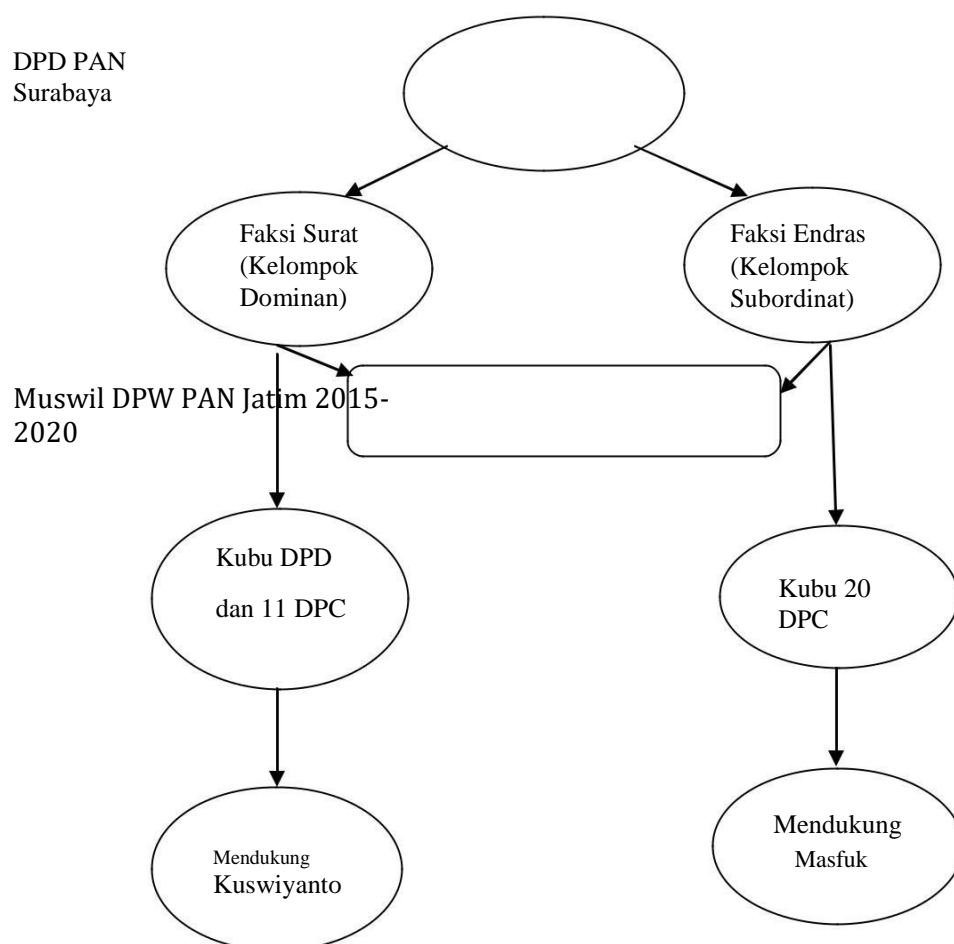
Tabel Daftar Kubu DPD PAN Surabaya

KUBU 20 DPC		KUBU DPD	
• Tandes	• Kenjeran	• DPD PAN Surabaya	• Sambu Kerep
• Benowo	• Sukolilo	• Gayungan	• Simokerto
• Rungkut	• Asemrowo	• Genteng	• Tambaksari
• Dukuh Pakis	• Pakal	• Gubeng	• Tegalsari
• Wonokromo	• Sukomanunggal	• Jambangan	• Tenggilis Mejoyo
• Karangpilang	• Sawahan	• Krembangan	• Wiyung
• Wonocolo	• Gunung Anyar		
• Bubutan	• Mulyorejo		
• Semampir	• Lakar Santri		
• Pabean Cantikan	• Bulak		

Sumber : Hasil Data Peneliti

Penulis mencoba memetakan faksionalisasi di DPD PAN Surabaya antara kubu DPD dan kubu ke 20 DPC. Berikut diagram perpecahan yang terjadi di DPD PAN Surabaya:

Skema 3.2 Peta Faksionalisasi DPD PAN Surabaya



Dinamika Karakteristik Faksionalisasi

Faksionalisasi yang terjadi di DPD PAN Surabaya jika dianalisis berdasarkan perspektif teori karakteristik faksionalisasi (Boucek, 2009). Pada awalnya termasuk kedalam faksionalisasi kompetitif, dapat dilihat faksionalisasi yang terjadi muncul ketika ada perbedaan pendapat, konflik kepentingan, dan perebutan jabatan Ketua DPW PAN Jatim. Adanya perebutan jabatan Ketua DPW PAN Jatim menghadirkan gaya politik sentrifugal dan fragmentasi yang semakin mengeraskan perkubuan di dalam DPD PAN Surabaya.

Faksionalisasi kompetitif dipahami sebagai suatu pola yang bersifat sementara dan taktis, sehingga jika melihat sifat dari faksionalisasi yang terjadi di internal DPD PAN Surabaya tidak lama dan hanya terjadi pada isu-isu tertentu. Setelah adanya intervensi dari DPP PAN mengenai pemilihan Ketua DPW PAN Jatim, seluruh kubu yang pada awalnya saling bersaing akhirnya menyatu dan menerima rekomendasi dari DPP untuk menunjuk Masfuk sebagai ketua DPW PAN Jatim. Faksionalisasi di DPD PAN Surabaya tidak termasuk dalam bentuk kooperatif karena DPD PAN Surabaya dalam hal ini tidak memberikan ruang maupun memfasilitasi pengelompokan faksi diantara anggotanya. Sehingga dinamika diantara faksi lebih bersifat kompetitif.

Pada kenyataannya energi kompetisi faksional di dalam DPD PAN Surabaya belum dapat dikelola dengan baik, sehingga mempengaruhi stabilitas partai dan membuat kebuntuan pembuatan keputusan di partai. Dampak dari kompetisi ini juga mempengaruhi pembuatan

keputusan di internal DPD PAN Surabaya, dimana pelaksanaan Musda menjadi berlarut-larut karena adanya perbedaan pendapat dari faksi yang ada.

Perkembangan dinamika faksionalisasi yang terjadi sudah sampai dalam tahap privatisasi faksi dan sehingga sampai mendorong konflik internal yang parah yang dapat menjerumuskan partai pada perpecahan. Terbukti ketika proses Muswil selesai kubu pemenang mencoba mengakomodasi kubu yang kalah. Tetapi posisi jabatan di struktural partai didominasi oleh kubu pemenang. Ketua partai terpilih mencoba menaruh orang dari kubunya didalam struktural partai mulai dari wilayah sampai ditingkat daerah. Terkesan bahwa kubu yang kalah hanya diberikan posisi sebagai penyelesaian permasalahan secara formal agar kepengurusan yang baru dapat berjalan dengan baik. Terjadi upaya pelemahan partai oleh kubu yang kalah, sehingga menghambat kinerja partai.

Terakhir muncul wacana untuk mengeluarkan kubu yang kalah dari kepengurusan karena dianggap sudah menghambat kinerja partai. Walaupun kebijakan untuk mengeluarkan ini dapat berupa reposisi ke kepengurusan partai ditingkat pusat maupun kepengurusan dibawahnya, yang terpenting adalah lawan dari faksinya tidak menduduki posisi strategis di dalam struktural partai yang dapat mengganggu kinerja partai yang ia pimpin. Dari keadaan diatas dapat terlihat bahwa faksionalisasi yang terjadi internal DPD PAN Surabaya sudah mengarah pada faksionalisasi degeneratif. Hal ini bergantung pada bagaimana kemudian partai mengelola perpecahan yang terjadi, apakah akan ada upaya konsolidasi atau malah ada upaya untuk mengeluarkan kubu yang kalah dari structural partai.

Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dari hasil temuan lapangan ini bahwa penyebab terjadinya faksionalisasi di DPD PAN Surabaya pada saat Muswil DPW PAN Jatim tidak hanya disebabkan oleh tiga faktor sebagaimana dijelaskan oleh Belloni dalam teorinya, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain. *Pertama*, disebabkan adanya perbedaan kepentingan dari elit DPP PAN dan elit partai di daerah dalam strategi partai terkait mekanisme pemilihan ketua partai ditingkat DPW, DPD dan DPC. Perubahan strategi ini dianggap sebagai upaya untuk memuluskan keinginan DPP mengusung Masfuk sebagai calon ketua DPW PAN Jatim, dan hal ini memunculkan perlawanan dari kader di daerah untuk mengusung Kuswiyanto sebagai pesaing dapat dilihat sebagai kontestasi kepentingan elit baik pusat maupun daerah untuk menduduki posisi sebagai ketua DPW PAN Jatim.

Kedua, mekanisme Pengambilan Keputusan oleh Pusat dalam menyelesaikan polemik di Muswil DPW PAN dapat dinilai sebagai kemunduran penerapan demokratisasi di internal partai. Suasana pengelompokan yang ada di internal DPD PAN Surabaya juga mempengaruhi hasil keputusan Muswil. Faksi di DPD PAN Surabaya terlibat secara langsung dalam perebutan otoritas dan kekuasaan internal partai melalui jabatan ketua DPW.

Selanjutnya mengenai kesimpulan dari hasil temuan lapangan terkait wujud dari faksionalisasi yang terjadi di DPD PAN Surabaya, bahwa faksionalisasi di DPD PAN Surabaya tidak termasuk dalam bentuk kooperatif karena DPD PAN Surabaya dalam hal ini tidak memberikan ruang maupun memfasilitasi pengelompokan faksi diantara anggotanya.

Sehingga dinamika diantara faksi lebih bersifat kompetitif. Energi kompetisi faksional di dalam DPD PAN Surabaya belum dapat dikelola dengan baik, sehingga mempengaruhi stabilitas partai dan membuat kebuntuan pembuatan keputusan di partai. Dampak dari kompetisi ini juga mempengaruhi pembuatan keputusan di internal DPD PAN Surabaya, dimana pelaksanaan Musda menjadi berlarut-larut karena adanya perbedaan pendapat dari faksi yang ada.

Dalam perkembangan dinamika faksionalisasi yang terjadi sudah sampai dalam tahap privatisasi faksi dan sehingga sampai mendorong konflik internal yang parah yang dapat menjerumuskan partai pada perpecahan. Terbukti ketika proses Muswil selesai kubu pemenang secara normatif mencoba mengakomodasi kubu yang kalah. Tetapi posisi jabatan di struktural partai didominasi oleh kubu pemenang. Terkesan bahwa kubu yang kalah hanya diberikan posisi sebagai penyelesaian permasalahan secara formal agar kepengurusan yang baru dapat berjalan dengan baik. Terjadi upaya pelemahan partai oleh kubu yang kalah, sehingga menghambat kinerja partai. Pada akhirnya muncul wacana untuk mengeluarkan kubu

yang kalah dari kepengurusan karena dianggap sudah menghambat kinerja partai. Dari keadaan diatas dapat terlihat bahwa faksionalisasi yang terjadi internal DPD PAN Surabaya sudah mengarah pada faksionalisasi degeneratif. Hal ini bergantung pada bagaimana kemudian partai mengelola perpecahan yang terjadi, apakah akan ada upaya konsolidasi atau malah ada upaya untuk mengeluarkan kubu yang kalah dari struktural partai.

Terakhir mengenai kontribusi penelitian ini bagi kajian faksionalisasi kepartaian, dari hasil penelitian ini terlihat bahwa faktor yang mempengaruhi munculnya faksionalisasi di dalam partai tidak hanya disebabkan oleh faktor ideologi, regenerasi kepemimpinan, dan karakter patronase, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor perubahan strategi politik partai terkait mekanisme pemilihan ketua partai dan juga adanya gaya sentralistik dalam pengambilan keputusan bagi internal partai.

Daftar Pustaka

- Belloni, Frank. P. and Dennis C. Beller (eds) (1978) *Faction Politics: Political Parties and Factionalism in Comparative Perspectives*. Santa Barbara, CA: ABC-Clio Inc.
- Bima Arya Sugianto, "Beyond Formal Politics: Party Factionalism and Leadership in Post – Authoritarian Indonesia" (Department Of Political and Social Change Research School Of Pacific and Asian Studies The Australian National University, 2006).
- Boucek, Françoise. 2009, *Rethinking Factionalism*, New York: Palgrave Mac Milan.
- Efriza, 2012, *Political Explore-Sebuah kajian Ilmu Politik*, Bandung : Alfabeta, hlm 240.
- Rasid Pora, *Konflik Elit Dalam Kontestasi Kekuasaan Internal Partai Politik (Studi Pada DPW Partai Amanat Nasional Propinsi Maluku Utara Tahun 2013)*, Journal of Governance and Public Policy(JGPP), Volume 1 No 1 April 2014, halaman 84
- Rose, R. (1964), 'Parties, Factions and Tendencies in Britain', Political Studies
- Sartori, Giovanni. 1976. *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis*, vol 1. Cambridge: Cambridge University Press.